

Nama Penulis: Fitri Herdayani, Supardi.

**PERANAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)
UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA
DI DESA PANGKALAN BENTENG KECAMATAN TALANG KELAPA
KABUPATEN BANYUASIN**

Oleh:

Fitri Herdayani¹, *Supardi²

Email: fitriherdayani@gmail.com

¹FISIP Universitas Tamansiswa Palembang

²FISIP Universitas Tamansiswa Palembang

ABSTRAK

Pembangunan desa bukan saja merupakan tugas dan tanggung jawab dari Pemerintah melalui perangkat-perangkatnya yang telah ada, tapi juga merupakan tugas dan tanggung jawab semua pihak. Selain itu, partisipasi atau keikutsertaan masyarakat juga sangat besar pengaruhnya bagi pembangunan desa. Dengan menggunakan metode deskriptif, penelitian ini membahas tentang permasalahan bagaimanakah peranan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa tersebut dan kendala-kendala dan Upaya apa yang dihadapi untuk mengatasi kendala-kendala itu. Penelitian ini menemukan bahwa peranan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa tersebut memang cukup besar dan potensial dalam meningkatkan pembangunan desa Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Hasil analisis data yang dilakukan, Partisipasi disimpulkan bahwa peranan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) untuk meningkatkan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa tersebut memang nyata ada dan selama ini telah mampu menggalang partisipasi anggota masyarakat tersebut. Kendala yang ada pada dasarnya telah dapat diatasi dengan berbagai upaya yang telah dilakukan.

Kata Kunci: Peranan Kader, Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Desa.

ABSTRACT

Village development is not only the duty and responsibility of the Government through its existing instruments, but it is also the duty and responsibility of all parties. In addition, community participation or participation is also very influential for village development. Using a descriptive method, this study discusses the problem of how the role of the Village Community Empowerment Cadre (KPMD) is to increase community participation in village development and what obstacles and efforts are being faced to overcome these obstacles. This study found that the role of the Village Community Empowerment Cadre was indeed quite large and potential in increasing the development of Pangkalan Benteng village, Talang Kelapa District, Banyuasin Regency. The results of the data analysis carried out, it was concluded that the role of the Village Community Empowerment Cadre (KPMD) to increase Community Participation in Village Development was real and had been able to mobilize the participation of these community members. The existing obstacles have basically been able to be overcome with various efforts that have been made.

Keywords: Role of Cadre, Community Participation, Village Development.

¹ Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Tamansiswa Palembang.

² Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Tamansiswa Palembang.



JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

Nama Penulis: Fitri Herdayani, Supardi.

A. Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil makmur yang merata, materil, spiritual, berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.³ Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tatacara Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pertahun (RKP) yang akan dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah di tingkat pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.⁴

Lembaga kemasyarakatan desa yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintahan desa dalam pemberdayaan masyarakat.⁵ Wujud perencanaan pembangunan desa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dokumen perencanaan untuk pembangunan periode 5 tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, dan program satuan perangkat kerja daerah. Kemudian dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) dokumen untuk satu tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).⁶ Desa yang memuat rancangan kerangka sarana dan prasarana desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang di mutakhirkan ke program prioritas desa, rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Pembangunan tersebut dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai

dengan tujuan Pembangunan Nasional itu sendiri.⁷

Masalah pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional sangat penting, karena faktor daerah adalah faktor yang sangat menentukan berhasil tidaknya pencapaian tujuan pembangunan nasional, sehingga dapat dikatakan bahwa pembangunan nasional tidak akan berhasil jika pembangunan daerah tidak berjalan dengan baik.⁸ Salah satu bidang pembangunan daerah yang menjadi perhatian pemerintah adalah pembangunan desa. Ini tidak mengherankan karena pembangunan desa merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat serta sebagai usaha pembangunan yang dilaksanakan pada unit pemerintah terendah.⁹

Berkaitan dengan hal diatas, maka kebijaksanaan yang diambil pemerintah dengan menjadikan pembangunan desa sebagai salah satu bidang pembangunan dalam setiap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) merupakan langkah yang tepat. Bahkan akhir-akhir ini sebagai bagian dari Pembangunan Nasional semakin besar yaitu dengan menjadikan bidang pembangunan desa sebagai salah satu bidang pembangunan yang di prioritaskan. Agar pembangunan desa tersebut dapat dijalankan dengan lancar, maka harus ada aparat pembangunan yang secara khusus mengerakkan pembangunan, tanpa mengurangi atau mengecilkan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pembangunan.¹⁰ Hakekatnya, pembangunan desa adalah pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat, Dari Oleh Untuk Masyarakat (DOUM). Oleh sebab itu peranan masyarakat dalam pembangunan tersebut sangat diperlukan untuk kesuksesan pembangunan dan

³. Erna Ratnaningsih, <https://business-law.binus.ac.id/2017/08/27/perbedaan-tujuan-dan-arah-pembangunan-hukum-nasional-sebelum-dan-sesudah-amandemen-uud-1945/>

⁴. <https://www.bappenas.go.id/id>

⁵. *Ibid.*

⁶. Andi Ariadi, *Perencanaan Pembangunan Desa*, Meraja Journal, Vol.2, No.2, Juni 2019, hlm.135.

⁷. *Op.Cit.* <https://www.bappenas.go.id/id>

⁸. <https://bappeda.bulelengkab.go.id/>

⁹. *Ibid.*

¹⁰. <https://www.bappenas.go.id/id>

Nama Penulis: Fitri Herdayani, Supardi.

hasil pembangunan yang dilakukan itu akan besar manfaatnya bagi masyarakat. Selanjutnya, pembangunan desa itu sendiri tidak hanya dilakukan oleh aparat pemerintah saja, tetapi juga dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang telah dibekali pengetahuan tentang pembangunan desa. Mereka ini dikenal dengan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).¹¹

Peranan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa pada saat ini sangat diperhatikan oleh pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2007 yang menjelaskan kedudukan dan peranan kader pemberdayaan masyarakat desa. Dengan demikian Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) merupakan pelopor, penggerak dan pembimbing masyarakat agar masyarakat mau dan mampu berpartisipasi dalam upaya pembangunan desa itu. ¹² Dalam hal ini, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) merupakan tenaga sukarela yang aktif dalam pembangunan desa yang sekaligus merupakan bagian integral dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).

Intelektualisasi dan kemampuan teknis sebagai hasil pendidikan formal nampaknya tidak serta merta menjamin muncul dan berkembangnya integrasi sosial dan integrasi nasional. Kiranya dapat diterima secara umum bahwa analisa kritis dapat memicu tumbuhnya kesadaran kritis dan kesadaran kritis dapat mendorong munculnya tindakan.¹³ Akan tetapi munculnya tindakan nyata dan disadari hanya akan terjadi bila ada rasa tanggung jawab, rasa malu, dan rasa bersalah. Selain itu juga akan muncul bila memiliki keyakinan bahwa tindakan yang dilakukan adalah sebuah kewajiban dan

tindakan bernilai yang terlepas dari kepentingan-kepentingan pribadi. Posisi ini menempatkan seseorang atau kelompok memiliki predikat kader yang selalu berupaya mewujudkan hal ideal dalam kenyataan, memecah kebekuan, pelopor pembaharuan dan mencegah penyimpangan amanah. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) telah meliuncurkan pembangunan partisipatif yang diharapkan dapat melahirkan kebijakan pembangunan pro rakyat miskin.¹⁴ Dalam rangka itu pula perencanaan partisipasi diintegrasikan ke dalam sistem pembangunan reguler. Integrasi tentunya tidaklah dapat diartikan hanya sebagai penyamaan jadwal, kebersamaan dalam forum musrenbang. Integrasi hendaknya di pahami sebagai melekatkan dan memfungsikan perencanaan berbasis rakyat desa ke dalam ranah perencanaan publik.¹⁵

Dengan pemahaman ini maka dalam rangka menegakkan kemandirian desa dan otonomi desa maka setiap kelompok sosial di desa atau pihak-pihak yang berpengaruh dalam perubahan sosial dalam masyarakat desa perlu dipandang sebagai sebuah potensi. Rakyat desa sesuai konstitusi harus dipandang dan diperlakukan sebagai subjek yang memiliki otoritas bertanggung jawab dan berdaulat secara nyata sehingga keputusan-keputusan pembangunan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan berbasis rakyat dapat diwujudkan.¹⁶ Norma-norma adil yang menyangkut hak-hak rakyat desa secara menyeluruh patut dibangun. Hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas kehidupan yang layak, hak atas perlakuan yang adil termasuk relasinya dengan desa-desa lain dalam "Negara" ini perlu dibangun.¹⁷

Kaderisasi kader pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk menjadi manusia

¹¹. Almasri, Dewi Deswimar, *Peran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pembangunan Pendesaan*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, hlm. 48.

¹². Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Dan Tanggapan Atau Saran Dari Masyarakat Atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

¹³. Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana & Praktik*, Jakarta: Prenada Media Grup, hlm. 4.

¹⁴. *Ibid*.

¹⁵. *Ibid*, hlm.6.

¹⁶.Dwi Iriani Margayaningsih, *Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan*, hlm.164-165.

¹⁷. *Ibid*.

Nama Penulis: Fitri Herdayani, Supardi.

pembangun yang mencerahkan dan membangun kesadaran kritis masyarakat dalam rangka pembangunan kecerdasan umum yang akan menggunakan kelembagaan masyarakat sebagai alat pembangunan norma-norma dalam koridor konstitusi dalam rangka menegakkan keadilan bagi masyarakat perdesaan. Berkaitan dengan hal diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Peranan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) tersebut dalam usaha-

usaha pembangunan desa, terutama untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, sehingga ditetapkan judul : **“PERANAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD) UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA PANGKALAN BENTENG KECAMATAN TALANG KELAPA KABUPATEN BANYUASIN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) untuk meningkatkan partisipasi

2. masyarakata dalam Pembangunan Desa di Desa Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin?
Kendala-kendala dan Upaya apa yang dihadapi oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan desa?

C. Pembahasan

1. Peranan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin

Peranan kader pemberdayaan masyarakat desa dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peranan dalam aktivitas bimbingan dan pendidikan terhadap masyarakat dalam rangka menumbuhkan partisipasinya dalam pembangunan desa yang dilakukan oleh kader pemberdayaan masyarakat desa di Desa Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Dalam penelitian ini, peranan kader pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Dalam hal pengumpulan data mereka bekerjasama dengan LPMD setempat dan Kepala Urusan Pembangunan di desa tersebut dan

mendorong terciptanya keterpaduan dalam pembangunan desa tersebut dengan memberikan contoh kepada masyarakat.

Peranan kades pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Tentu saja tidak akan terlepas dari tahapan-tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembangunan tersebut dimana setiap langkah tersebut memerlukan data yang akurat agar pelaksanaan pembangunan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Peranan kader pemberdayaan masyarakat desa dalam hal ini adalah mengumpulkan dan mengelola data desa yang bermanfaat untuk merencanakan pembangunan. Data tersebut diarahkan untuk perencanaan pembangunan desa. Pengelolaan dan pengumpulan data tersebut dimaksudkan untuk mengarahkan dan menentukan prioritas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang dituangkan kedalam

Nama Penulis: Fitri Herdayani, Supardi.

RPJMDes didesa tersebut.¹⁸ Adapun data yang dikumpulkan dan diolah itu adalah data tentang administrasi desa, pemerintahan desa, monografi desa, profil desa, dan RPJMDes, pelaksanaan pembangunan desa dan kependudukan serta data lainnya yang berhubungan dengan buku-buku administrasi desa.¹⁹ Selanjutnya adalah mengenai cara mengumpulkan dan mengelola data tersebut, ternyata kader pemberdayaan masyarakat didesa itu mengungkapkan:

“...bahwa dalam hal mengumpulkan data, lebih cenderung atau mengacu kepada data yang ada di lapangan dan mencocokkan dengan buku-buku administrasi desa kemudian disamakan dengan keadaan yang sebenarnya...”

(Rahman Edo 08 Mei 2021)

Dalam hal ini kader pemberdayaan masyarakat desa dalam menanggapi/menterjemahkan dan menyalurkan kehendak atau aspirasi masyarakat tersebut benar-benar diperlukan, karena jika mereka tidak jeli dalam menanggapi/menyalurkan dan menterjemahkan aspirasi masyarakat tersebut, maka peranan mereka sebagai penghubung dengan aparat terkait dengan sendirinya tidak dapat dilaksanakan dengan baik.²⁰ Sebagaimana dinyatakan oleh seorang kader pemberdayaan masyarakat desa Pangkalan Benteng, sebagai berikut:

“...mereka menjadi semacam penyambung lidah bagi masyarakat di desanya, karena baik secara formal maupun informal masyarakat dapat langsung menyampaikan aspirasinya kepada kami.”

(A.Yadi, 9 Mei 2021)

Dapat dikatakan bahwa peranan kader pemberdayaan masyarakat desa dalam

mengerahkan dan menghubungkan masyarakat dengan aparat terkait dalam pembangunan di desa itu, merupakan peranan mutlak atau peranan utama yang harus dilakukan oleh setiap Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).²¹ Dari hasil pengumpulan data penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peranan kader pemberdayaan masyarakat desa dibidangnya sangat penting dilakukan dan perlu ditumbuhkan, sehingga aspirasi masyarakat benar-benar dapat disampaikan kepada aparat terkait. Dengan demikian jika masyarakat tersebut merasa bahwa akan mendukung pelaksanaan pembangunan desa yang berdasarkan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat atau bisa juga disebut dari, oleh, dan untuk masyarakat desa.

Peranan kader pemberdayaan masyarakat desa dalam mengerahkan masyarakat dan pembangunan desa Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, adalah upaya yang dilakukan oleh para kader pemberdayaan masyarakat desa tersebut untuk meningkatkan aktivitas dalam setiap pembangunan yang ada baik pembangunan fisik dan non fisik.

Pembangunan fisik akan lebih jelas terlihat bagaimana pembangunan itu dilaksanakan, siapa yang melaksanakan pembangunan itu, kapan pembangunan tersebut dapat diselesaikan dan dapat pula diperhatikan kekurangan dan kelebihanannya.²² Penilaian terhadap pembangunan non fisik jauh lebih rumit jika dibandingkan dengan penilaian terhadap hasil-hasil pembangunan yang bersifat fisik. peranan kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD) dan pelaku-pelaku lain,²³ untuk itu dapat kita lihat dan diperhatikan pada tabel berikut ini:

¹⁸. Puji Hadiyanti, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Ketrampilan Produktif di PKBM Rawasari Jakarta Timur*, Perspektif Ilmu Pendidikan - Vol. 17 Th. IX April 2008, hlm. 96.

¹⁹. Ibid.

²⁰. Deigy Ireine Tasik, *Efektivitas Penyelenggaraan Tertib Administrasi Pemerintahan*

Desa Tempang Tiga Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa, UNSRAT Manado, hlm.9.

²¹. Deigy Ireine Tasik, *Op.Cit*, hlm. 10.

²². <https://bappeda.bulelengkab.go.id/>

²³. Ibid.

Nama Penulis: Fitri Herdayani, Supardi.

Tabel 27

Hasil pembangunan fisik di desa Pangkalan Benteng
Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin

No	Kegiatan	Volume	Sumber Dana
1	Pembuatan balai desa	1 unit	PNPM – MP
2	Pembuatan gedung PAUD	1 unit	PNPM – MP
3	Pembuatan jalan rabat beton	P 1300 x L 2 x T 0,10 m	PNPM – MP
4	Pembuatan drainase	P 1000 x L 0,60 x T 0,50 m	PNPM – MP
5	Pembuatan 4 unit jembatan	1 paket	PNPM – MP
6	Pembuatan drainase	P 750 L 0,60 x T 0,50 m	PNPM – MP

Sumber: KPMD Pangkalan Benteng Kec. TI. Kelapa Kab. Banyuasin

Selain pembangunan fisik ada juga pembangunan non fisik yang dilakukan oleh para kader pemberdayaan masyarakat desa Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten

Banyuasin, dapat kita lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 28

Hasil pembangunan non fisik di desa Pangkalan Benteng
Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin

No	Kegiatan	Keterangan
1	Identifikasi Kelompok SPP	1 kali
2	Menginformasikan kegiatan hasil MAD	Kepada masyarakat desa
3	Memfasilitasi musyawarah desa	1 kali
4	Pendataan RTM	1 kali
5	Mengikuti pelatihan KPMD	1 kali
6	Mengikuti rakor bulanan	8 kali

Sumber: KPMD Pangkalan Benteng Kec. TI. Kelapa Kab. Banyuasin

Jika diperhatikan maka akan terlihat bahwa pembangunan fisik dan non fisik di desa Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin sudah banyak perubahan dari tahun ke tahun. Pembangunan ini atas kerjasama antara masyarakat dengan aparat terkait terutama kader pemberdayaan masyarakat desa yang

menggali gagasan untuk pembangunan desa yang sangat dibutuhkan oleh warga setempat. Berdasarkan data-data yang diperoleh dapat juga diketahui tentang cara penilaian hasil-hasil pembangunan yang dilakukan oleh kader pemberdayaan masyarakat desa di desa tersebut. Dibandingkan dengan penilaian hasil-hasil pembangunan non fisik, ada hambatan

Nama Penulis: Fitri Herdayani, Supardi.

dalam hal menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan pembangunan itu.

Adapun cara penilaian lainnya jika yang dinilai suatu badan atau organisasi, maka organisasi tersebut selalu dipantau aktivitasnya dan dinilai pula bobot aktivitasnya yang dilakukan itu, selanjutnya jika yang dinilai itu adalah hasil pelaksanaan pembinaan ataupun penyuluhan kepada masyarakat, maka penilaiannya adalah sejauh mana ketertarikan masyarakat terhadap

pembinaan atau penyuluhan itu.²⁴ Tingkat ketertarikan dan penilaian masyarakat terhadap aktivitas tersebut dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan non fisik yang dilakukan dalam bentuk berbagai penyuluhan atau pembinaan didesa tersebut. Dalam pengamatan penulis, cara inilah yang dipakai oleh para kader pemberdayaan masyarakat desa menilai hasil pembangunan non fisik di desa tersebut.

2. Kendala-kendala dan Upaya apa yang dihadapi oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan desa

Adapun kendala-kendala yang terdapat dalam pelaksanaan peranan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin adalah hambatan-hambatan yang dihadapi oleh para kader di desa Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam upaya pembangunan desa tersebut. Berdasarkan hasil dari pengumpulan data dilokasi penelitian, ditemukan tiga hambatan pokok yang dihadapi oleh seorang kader pemberdayaan masyarakat desa yang ada didesa tersebut.

Hambatan yang pertama adalah keterbatasan waktu yang dimiliki oleh para kader pemberdayaan masyarakat desa dalam melaksanakan peranan mereka, sehingga sering terjadi bahwa program-program yang telah disusun sebelumnya tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh para kader pemberdayaan masyarakat didesa tersebut. Hambatan yang kedua adalah struktur masyarakat desa didesa tersebut

aktivitasnya berbeda-beda, hal ini menyebabkan relatif rendah partisipasi mereka dalam setiap upaya pembangunan desa yang dilaksanakan. Namun demikian, partisipasi masyarakat ini tetap dapat diwujudkan dalam bentuk penerimaan sumbangan materi. Hambatan yang terakhir adalah permasalahan dana dan koordinasi dengan aparat terkait. Dana merupakan unsur penting dalam setiap upaya pembangunan yang akan dilaksanakan, tanpa adanya dana yang cukup maka pembangunan tidak dapat berjalan dengan lancar. Sedangkan koordinasi dalam hal ini adalah kerjasama dengan pihak terkait terutama dengan aparat desa, sebagaimana diketahui bahwa aparat desa adalah ujung tombak bagi pemerintah.

Upaya yang dilakukan itu antara lain membagi waktu yang tepat antara aktivitas kader dalam urusan pemberdayaan dan pembangunan desa dan untuk urusan pribadi mereka. Hal ini sudah menjadi resiko bagi seorang kader pemberdayaan masyarakat desa yang merupakan sukarelawan pembangunan desa, mereka rela berkorban untuk kepentingan masyarakat di wilayahnya masing-masing. Upaya berikutnya

²⁴. Puji Hadiyanti, *Op.Cit*, hlm.98.

Nama Penulis: Fitri Herdayani, Supardi.

dilakukan oleh para kader didesa tersebut adalah mencari tempat yang cocok dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat dan mendesak untuk dibangun, supaya masyarakat dapat meluangkan waktunya untuk ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang ada didesa terutama dalam program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan yang telah dibangun dari usulan masyarakat dan masyarakat yang mengerjakan kegiatan itu. Disetiap bulan diadakan

rapat koordinasi dari kader pemberdayaan masyarakat desa yang difasilitasi oleh PNPM-MPd dan dilaksanakan di sekretariat PNPM-MPd untuk membahas masalah atau hambatan dalam pelaksanaan peranan kader pemberdayaan masyarakat desa itu, dengan upaya-upaya yang ada tersebut diharapkan masalah dan hambatan yang ada dapat diminimalkan pada masa-masa yang akan datang.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Peranan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin merupakan peranan secara sukarela dilaksanakan mereka dalam rangka memajukan masyarakat dan memacu pembangunan baik fisik maupun non fisik di desa tersebut. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) sebagai tenaga penggerak pembangunan desa, oleh karena itu keberhasilan pembangunan desa sangat tergantung partisipasi seluruh anggota masyarakat desa itu sendiri, karena pembangunan desa dilaksanakan dari, oleh, untuk masyarakat sendiri dalam hal ini Desa Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.

Hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanan peranan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) sebagai agen pembaharuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan itu pada prinsipnya belum dapat diatasi dengan upaya yang telah dilakukan. Untuk itu perlu adanya upaya yang lebih giat lagi baik oleh kader, unsur

masyarakat, dan aparat pemerintahan desa setempat.

2. Saran

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap peranan mereka itu, jika perlu peranan yang melekat dalam setiap kader tersebut dikurangi sehingga mereka lebih mampu melaksanakannya.

Perlu dipertimbangkan untuk dijadikan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) tersebut sebagai tenaga profesional sehingga mereka lebih mampu berkonsentrasi dan mempunyai waktu yang cukup untuk melaksanakan peranannya itu.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang ada masih perlu ditingkatkan lagi. Demikian juga halnya dengan peningkatan kemampuan dan keterampilan para Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), hal ini sangat penting dilakukan sehingga para kader pemberdayaan masyarakat desa itu benar-benar mampu melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

Nama Penulis: Fitri Herdayani, Supardi.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Ariadi, *Perencanaan Pembangunan Desa*, Meraja Journal, Vol.2, No.2, Juni 2019.

Almasri, Dewi Deswimar, *Peran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pembangunan Pendesaan*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Deigy Ireine Tasik, *Efektivitas Penyelenggaraan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa Tempang Tiga Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa*, UNSRAT Manado.

Dwi Iriani Margayaningsih, *Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan*.

Erna Ratnaningsih, <https://business-law.binus.ac.id/2017/08/27/perbedaan-tujuan-dan-arah-pembangunan-hukum-nasional-sebelum-dan-sesudah-amandemen-uud-1945/>

Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana & Praktik*, Jakarta: Prenada Media Grup.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Dan Tanggapan Atau Saran Dari Masyarakat Atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

<https://bappeda.bulelengkab.go.id/>

<https://www.bappenas.go.id/id>